

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah kemiskinan sekarang ini masih merupakan penyakit kronis, terutama di Negara-negara berkembang. Indonesia merupakan Negara berkembang yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang agraris. Walaupun tanah Indonesia subur, namun tingkat pendapatan tidak begitu besar. Mayoritas penduduk yang bekerja di bidang pertanian berada di bawah garis kemiskinan.

Soetrisno Loekman (1997:30-31) menyatakan bahwa tahun 1993 bagi sejarah pembangunan Indonesia merupakan tahun yang sangat bersejarah karena pada tahun tersebut untuk pertama kali secara terbuka pemerintah menyatakan bahwa masih cukup banyak anak bangsa Indonesia yang masih harus hidup dibawah garis kemiskinan, dan secara terbuka pula pemerintah menyatakan keinginannya untuk lebih serius menangani masalah itu. Menjelang akhir Pelita V, ketika semula telah dicanangkan bahwa pembangunan Indonesia telah siap memasuki tahap tinggal landas, tiba-tiba pemerintah memperoleh data perihal jumlah anak bangsa yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Jumlah 27 juta anak bangsa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan merupakan jumlah yang tidak sedikit, walaupun diakui bahwa jumlah itu relative kecil apabila dibandingkan dengan jumlah orang miskin ketika Orde Baru mulai upaya pembangunannya. Data tentang jumlah orang miskin tersebut memang kemudian menimbulkan suatu kejutan yang luar biasa dikalangan aparat pemerintah yang

terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang selama ini merasa segala-galanya yang menyangkut pembangunan di Indonesia berjala dengan sempurna. Keterkejutan para perencana dan pelaksana pembangunan dapat kita amati dari reaksi mereka ketika pemerintah mengumumkan peta kemiskinan jumlah desa pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia yang dianggap sebagai desa miskin.

Kemiskinan menurut PNPM Mandiri Perkotaan dalam Modul Kegiatan Pelaksanaan Dasar BKM dan UP-UP (2011:1), “Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang/masyarakat dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak dan tidak berdaya menghadapi tantangan pembangunan yang terjadi”.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain :

1. Dimensi Politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.

2. Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital social.
3. Dimensi Lingkungan sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman.
4. Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak.
5. Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (*human capital*), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-

benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan dibentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Menurut PNPM Mandiri P2KP (2007:I),

BKM merupakan Nama generik dari suatu lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga di tingkat Kalurahan/desa, yang diprakarsai atau dikelola secara mandiri oleh masyarakat warga dalam upaya memenuhi kebutuhan/kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan menyatakan kepedulian bersama, dengan berbasis pada nilai-nilai luhur kemanusiaan (ikhlas, jujur, adil).

Badan keswadayaan masyarakat (BKM) adalah lembaga di bawah naungan PMPN Mandiri Perkotaan, yang mempunyai tujuan untuk membangun masyarakat pedesaan di berbagai segi bidang yang bertujuan untuk pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa atau mengentaskan kemiskinan.

Sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara 1945 alenia empat dan Pancasila terutama sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” maka rakyat Indonesia harus mempunyai keadilan secara merata, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Seluruh rakyat Indonesia diharapkan mendapat keadilan yang merata, tidak ada keluarga yang miskin termasuk masyarakat di Kalurahan Bolong. Wilayah Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang cukup subur. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian dengan ekonomi

lemah, sehingga kehidupan ekonomi kurang berkembang secara signifikan. Untuk mengentaskan keluarga miskin di Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar maka dibentuklah BKM Makmur Bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Upaya Mengentaskan Keluarga miskin melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Studi Kasus BKM Makmur Bersama di Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah profil keluarga miskin di Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimanakah upaya mengentaskan keluarga miskin melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Bersama di Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar?
3. Apakah kendala pelaksanaan dalam mengentaskan keluarga miskin melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Bersama di Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan profil keluarga miskin di Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mendeskripsikan upaya mengentaskan keluarga miskin melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Bersama di Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

3. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan dalam mengentaskan keluarga miskin melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Bersama di Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
- c. Sebagai upaya penerapan ilmu yang didapat selama menimba ilmu di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

a. *Bagi Masyarakat.* Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk berpartisipasi lebih optimal dalam pemerintahan desa melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Bersama.

b. *Bagi Pemerintah Desa.* Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi dalam mengentaskan kemiskinan di Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Bersama.

c. *Bagi Peneliti.* Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai upaya mengentaskan kemiskinan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Bersama dan sebagai sumber bahan baru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas.

E. Daftar Istilah

- Mengentaskan : Memperbaiki (menjadikan, mengangkat) nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang (lebih) baik.
- Kemiskinan : Ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang/masyarakat dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak dan tidak berdaya menghadapi tantangan pembangunan yang terjadi.
- BKM : Dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk Kalurahan, dan sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk Kalurahan.